



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7552921-7552922; Faksimili (0651) 75529922;
website : www.ar-raniry.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor :
Tanggal :

PEKERJAAN

.....

DIPA :

Nomor :
Tanggal :

Biaya:

Rp.

Tahun Anggaran :

Penyedia Barang/Jasa:

.....

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor :
Tanggal :

PEKERJAAN

.....
Pada hari ini, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor :, Tanggal
2. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor :, Tanggal
3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor, Tanggal

Maka PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Kerja, dengan ketentuan :

1. Lingkup Pekerjaan :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....

2. Pembayaran dengan Sumber Dana Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: , tanggal , dan ditransfer melalui Nomor Rekening atas nama
3. Jangka Waktu Pelaksanaan hari kalender, tanggal mulai kerja yaitu tanggal
4. Instruksi kepada PIHAK KEDUA :
Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.
5. Keadaan Memaksa :
a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau kegagalan akibat dari keadaan memaksa, maka **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Hal – hal yang dapat dimasukkan sebagai keadaan memaksa adalah : perang (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai bencana alam) dan tindakan pemerintah di bidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NIP.